

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Kewenangan Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Perilaku Pelanggaran dalam Bentuk Penipuan Penerimaan Pegawai PT KAI". Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya penegakan hukum dan ketertiban di Indonesia, yang terkait erat dengan profesionalitas lembaga penegak hukum, termasuk Polri. Kode Etik Profesi Polri berperan sebagai pedoman perilaku bagi anggota Polri. Penipuan dalam penerimaan pegawai, seperti yang terjadi di PT KAI, merupakan pelanggaran yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik institusi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kewenangan penegak kode etik Polri dalam menangani kasus penipuan penerimaan pegawai PT KAI; (2) menjelaskan mekanisme penegakan kode etik Polri terhadap pelanggaran tersebut; dan (3) menganalisis pandangan Islam terhadap kewenangan penegakan kode etik Polri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Kepolisian, dan Kode Etik Profesi Polri), bahan hukum sekunder (pendapat ahli, jurnal, berita), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan etika profesi, serta memberikan masukan bagi Polri, masyarakat, dan penulis sendiri. Penelitian ini juga mengkaji pandangan Islam tentang penegakan hukum dan amanah, yang relevan dengan tugas kepolisian.

Kata Kunci: *Kewenangan, Kode Etik Polri, Penipuan Penerimaan Pegawai, PT KAI, Hukum Islam.*